

Pendidikan Pada Masa Tanam Paksa dan Politik Liberal Belanda di Indonesia

Maya Marisa¹, Hudaidah²
^{1,2}Universitas Sriwijaya
marisamaya074@gmail.com
hudaidah@fkip.unsri.ac.id

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan pendidikan Indonesia pada masa tanam paksa sampai politik liberal di Indonesia dan memahami berbagai macam perkembangan dan pelaksanaan pendidikan Indonesia di pada masa itu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah melalui tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya pembelajaran dengan pendidikan modern yang menumbuhkan sikap nasionalisme serta menghasilkan kebutuhan tenaga terampil di Indonesia. Dengan demikian, perkembangan dan pelaksanaan pendidikan Indonesia pada masa tanam paksa dan politik liberal Belanda di Indonesia mendorong munculnya beberapa tokoh kebangkitan nasional yang memiliki pemikiran luas dan mau membela rakyat Indonesia untuk merdeka. Hal ini menjadi titik awal perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.

Kata Kunci: Pendidikan Indonesia, Tanam Paksa, Politik Liberal.

Abstract

The purpose of writing this article is to determine the background of the implementation of Indonesian education during the Dutch colonial era and to understand the various kinds of development and implementation of Indonesian education in the Dutch colonial era. The method used in the research of this article is the library approach method, which is a series of activities related to the method of collecting library data, reading, taking notes, and processing the study material. The result of education in the Dutch colonial era was the emergence of learning with modern education that fostered an attitude of nationalism and produced the need for skilled workers in Indonesia. Thus, the development and implementation of Indonesian education in the Dutch colonial era in Indonesia encouraged the emergence of several national awakening figures who had broad thoughts and wanted to defend the Indonesian people for independence. This became the starting point for the Indonesian nation's struggle for independence.

Keyword: development, education, Indonesia, dutch colonialism era

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak setiap manusia untuk meningkatkan harkat dan martabatnya. Dalam menyelenggarakan pendidikan sendiri banyak faktor yang memengaruhinya baik faktor internal maupun eksternal pada sistem pendidikan. Sistem

pendidikan yang diselenggarakan bukanlah hasil dari perencanaan menyeluruh, tetapi dari tahap demi tahap yang melalui eksperimentasi dan didorong oleh kebutuhan praktis perkembangan zaman. Sejarah suatu bangsa dapat dilihat dari pendidikan yang ditempuh oleh rakyatnya, bagaimana sejarah pendidikan di masa lampau dapat melahirkan cendekiawan yang menggagas dasar kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Begitu juga dengan Indonesia yang mengalami perkembangan dari masa klasik sampai saat ini melalui proses perkembangan dalam pendidikannya (Rifa'i, 2011).

Sebelum bangsa barat datang ke Indonesia, masyarakat di desa sudah mengenal pendidikan baik itu berasal dari keluarga maupun dari lingkungan. Pendidikan yang diperoleh dalam keluarga sangat berperan dalam mendidik anaknya agar menjadi anak yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Selain itu, setelah kedatangan agama Hindu dan Budha, kedatangan agama Islam juga memberikan pengaruh terhadap pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang diajarkan agama Islam saat itu dilakukan di langgar dan pondok pesantren (S. Kutoyo dan Sri Soetjiatingsih, 1981: 39).

Setelah bangsa Belanda datang ke Indonesia pendidikan yang diberikan membentuk masyarakat yang feodal. Hal ini disebabkan karena pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial berdasarkan garis warna dan diskriminatif, dimana pendidikan dibedakan berdasarkan jenis dan tingkatan yang telah dibagi oleh pemerintah kolonial menjadi kelompok-kelompok yaitu, kelompok Eropa, Timur Asing (Arab dan Cina), dan pribumi. Namun, dalam praktiknya penduduk pribumi dibagi lagi menjadi golongan priyayi dan golongan pribumi biasa. Penggolongan tersebut dilakukan berdasarkan pada golongan masyarakat dan status sosial. Penggolongan tersebut kemudian diperjelas dengan adanya penggunaan bahasa pengantar yaitu, bahasa Belanda seperti *Eerste Klasse School* atau Sekolah Kelas Satu dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar yang digunakan untuk golongan Eropa dan priyayi. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang digunakan untuk golongan pribumi biasa. Namun, pada tahun 1900 hingga 1930 terjadi perubahan yang cukup signifikan karena Pemerintah Kolonial Belanda (PKB) menerapkan politik etis yang didalamnya terdapat kebijakan edukasi, akan tetapi dalam praktiknya sendiri tetap tidak lepas dari kebijakan untuk kepentingan sendiri dan masih bersifat diskriminatif (Djumhur dan Danasuparta, 1974:146).

Dengan demikian, pendidikan gaya Barat ini telah mampu melemahkan pamor priyayi tradisional. Namun, disisi lain pendidikan gaya barat telah memunculkan kelas baru orang Indonesia dengan kesadaran politik yang dipersiapkan untuk reformasi politik dan mengambil peran utama dalam agitasi radikal, baik di kota maupun di desa. Awalnya kebijakan politik etis berupaya mengembangkan pendidikan barat untuk bumiputera/pribumi, tetapi dalam kenyataannya kebijakan tersebut justru menanamkan kesadaran nasionalisme untuk mengambil alih sistem yang akan dikembangkan sesuai dengan sistem yang telah lama berkembang dalam sistem pendidikan adat. Di sisi lain, kenyataan ini telah membangkitkan keinginan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan martabat bangsa yang dicari oleh organisasi modern masa itu (Sumarno, Aji, & Hermawan, 2019: 372).

Kajian-kajian tentang tanam paksa dan politik liberal pada masa kolonialisme Belanda lebih banyak menyinggung aspek ekonomi Hindia Belanda (Indonesia). Beberapa ada yang membicarakan kebijakan pendidikan kolonial Belanda, tetapi tidak ada yang secara spesifik bicara pada masa Tanam Paksa dan politik bebas Belanda. Di samping itu juga ada yang lebih khusus membicarakan pendidikan bagi etnis China di Indoensia. Penelitian tersebut di antaranya penelitian (Suratminto, 2013; Suryadinata, 1972; Zainu'ddin, 1970). Penelitian Sondarika (2019) lebih banyak menyoroiti tentang dampak kebijakan Tanam Paksa bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia dan penelitian Aprilia, dkk. (2021) lebih banyak membahas pendidikan di Indoensia pada masa Tanam Paksa. Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa di Hindia Belanda 1830-1870. Oleh karena itu keberbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan kebijakan pendidikan Belanda pada masa Tanam Paksa dan Politik Liberal di Indonesia. Penelitian bertujuan untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan pendidikan Indonesia pada masa Tanam Paksa dan memahami berbagai macam perkembangan dan pelaksanaan pendidikan Indonesia pada masa Politik Liberal kolonial Belanda.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah (Kuntowijoyo, 2015). Tahap-tahap dalam tata cara metode sejarah ini dilakukan melalui tahapan heuristik (pengumpulan informasi), kritik, interpretasi, dan historiografi (penyusunan sejarah) (Sjamsuddin, 2007). Proses heuristik dilakukan dimana data-data

dikumpulkan dari buku dan jurnal. Pengumpulan data-data ini diperoleh lewat riset kepustakaan yang relevan dengan riset yang sedang dilakukan. Setelah itu proses selanjutnya dilakukan kritik untuk mendapatkan fakta yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Tahap berikutnya adalah interpretasi. Interpretasi merupakan tahapan dimana data-data yang telah diverifikasi sehingga menjadi fakta sejarah kemudian dianalisis untuk memperoleh rangkaian peristiwa yang dihubungkan satu sama lain sehingga jadi satu kesatuan yang utuh serta logis. Tahap selanjutnya ialah penyusunan sejarah dimana dalam tahapan terakhir ini kerangka sejarah sudah terbentuk, selanjutnya disusun jadi suatu historiografi yang lengkap (Gottschalk, 1985: 57).

Pembahasan

Pendidikan Indonesia Pada Masa Tanam Paksa dan Politik Liberal Belanda

Sejak diterapkannya sistem tanam paksa (1830-1870) dan Politik Liberal (1870-1900) di Indoensia yang menyebabkan rakyat Indonesia menderita kemiskinan. Kebijakan Tanam Paksa pada tahun 1830-1870 mendapat kritik dari berbagai golongan. Hal ini dicontohkan oleh seorang pendeta yang kemudian menjadi anggota parlemen yaitu, Baron van Hoevell. Baron membela Indonesia dan memandang bahwa pemerintah kolonial harus memenuhi dan memerhatikan kepentingan masyarakat pribumi (A. Daliman, 2012).

Pada tahun 1885 perusahaan-perusahaan asing mulai bergabung di Indonesia. Hal ini membuat harapan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan semakin sulit. Selain itu, adanya upah rendah yang diberikan kepada buruh juga semakin menambah penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Multatuli (Douwes Dekker) melakukan kritik terhadap Pemerintah Kolonial Belanda (PKB) melalui bukunya yang berjudul *Max Havelaar*. Dalam buku ini ia menceritakan kondisi masyarakat petani yang menderita akibat mendapat tekanan dari pemerintah kolonial. Adapun gagasan C. Th. Van Deventer yang dimuat dalam majalah *De Gids* pada tahun 1899 dengan judul *Een Eereschuld* yang berarti hutang budi (Sartono Kartodirjo, dkk, 1976: 14). Tulisan ini berisi tentang kemakmuran Negeri Belanda yang diperoleh sebagai hasil kerja keras dan jasa masyarakat pribumi sehingga seharusnya bangsa Belanda membayar itu semua. Hal

ini dapat dilakukan dengan penyelenggaraan trilogi atau trias, yaitu irigasi, emigrasi (transmigrasi) dan edukasi.

Kemudian pemikiran van Deventer tersebut ditanggapi oleh Ratu Wilhelmina, pada 17 September 1901. Gagasan Van Deventer tersebut tertuang dalam pidato ratu Belanda yang berjudul *Ethische Richting* (Haluan Etis). Dalam pidato tersebut disebutkan bahwa pemerintah kolonial melakukan usaha-usaha untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan masyarakat pribumi. Hal ini dilakukan dengan menghidupkan kembali bidang agraris dan industry, memberikan pinjaman tidak berbunga dengan jangka waktu tertentu, dan dengan pemberian hadiah. Pidato ratu Belanda itu menjadi awal dari diberlakukannya kebijakan politik etis. (Kusmayadi: 145). Setelah pidato ratu Belanda tersebut muncul suatu ide yang dipandang sebagai suatu ide baru atau praktek politik baru yang disebut sebagai politik etis atau politik balas jasa. Namun, kebijakan politik etis ini sangat bertentangan dengan eksploitasi materi yang dilakukan pemerintahan kolonial. hal ini disebabkan karena politik etis lebih menonjolkan sikap kewajiban moral bangsa yang mempunyai kebudayaan tinggi terhadap bangsa yang tertindas (Nasution: 15).

Pelaksanaan edukasi dalam politik etis ini sebenarnya juga untuk memenuhi kepentingan pemerintah kolonial. Hal ini ditunjukkan dengan adanya diskriminasi dibidang pendidikan yang saat itu terdapat dua macam sekolah yaitu, Sekolah Ongko Siji untuk pribumi yang memiliki kedudukan dan Sekolah Ongko Loro untuk masyarakat pribumi yang biasa dengan tujuan untuk mendapatkan pegawai rendahan. Dengan demikian, pendidikan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan lulusan yang hanya bisa membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu, anggaran dana pendidikan untuk penduduk pribumi sangat sedikit. Pada tahun 1905 tunjangan sekolah tercatat hanya sebesar f 2 juta, sehingga jika dibagi dengan 40 juta penduduk maka per orang hanya mendapatkan 5 sen (A. Daliman, 2012).

Sistem Pendidikan Indonesia pada Masa Tanam Paksa dan Politik Liberal

Berdasarkan catatan sejarah, pada era kolonialisme di Indonesia sudah terdapat beragam sistem pendidikan. Ada beberapa pendidikan pesantren tradisional yang mengajarkan pendidikan agama Islam dan sistem persekolahan yang dibawa Belanda ke Indonesia. Menurut J. S. Furnivall pada masa kolonial Belanda anak yang menghadiri

sekolah bahasa Belanda di pagi hari untuk pengajaran sekuler biasanya akan dikirim ke sekolah Islam pada sore hari untuk pengajaran agama. Sekolah pagi mengajarkan keterampilan anak yang mengajarnya mencari nafkah sementara sekolah sore mengajarnya cara hidup (Zainu'ddin, 1970: 19).

Pada awal abad ke-20 sistem persekolahan belum banyak diminati oleh penduduk pribumi. Dengan demikian, pemerintah kolonial Belanda berupaya untuk memberi pengaruh pada masyarakat pribumi agar masuk dalam sistem pendidikan Barat (Salim dkk, 2007: 201). Pada abad ke-18 pendidikan dan pengajaran diberikan secara individu. Hal ini bertentangan dengan Capellen yang pernah mengajukan rencana program pendidikan pribumi kepada Gubernur Jenderal. Rencana ini menjanjikan penduduk pribumi fasilitas pendidikan modern. Namun, hal ini tidak terlaksana karena pemerintah kolonial tidak menemukan keuangan yang diperlukan. Rencana Capellen tersebut hanya berhasil melalui pendirian tiga sekolah pemerintah untuk anak-anak pribumi yaitu di Pasuruan, Karawang, dan Cianjur. Awal abad ke-19 sistem pendidikan ini diubah dengan sistem pendidikan Barat yang modern. Sebelum pemerintah Belanda mendirikan sekolah di Jawa sudah terdapat sekolah teologi yang khusus untuk penduduk beragama Kristen (Penders, 1968: 9).

Sekolah-sekolah di Jawa yang didirikan setelah tahun 1850 agak teratur. Tujuan pemerintah Belanda mendirikan sekolah tidak untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan tetapi untuk melatih beberapa orang bagi dinas pemerintahan Belanda sehingga tujuan pendidikan dan pengajaran waktu itu diarahkan untuk pendidikan pegawai bukan untuk membentuk sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan tersebut dianggap tidak bijaksana dari segi politis karena cenderung mengganggu produktivitas pribumi yang berakibat buruk pada produksi dan perdagangan pada tahun 1830- 1870 (Penders, 1968: 11). Selain itu, upaya beberapa pejabat kolonial yang lebih progresif untuk mendirikan sekolah bagi penduduk asli tidak berhasil karena tidak mendapat dukungan keuangan dari pemerintah kolonial (Brugmans, 1938: 89-92)

Pendirian sekolah merupakan implementasi dari Politik Etis, sebab Politik Etis menjadi kebijakan yang menarik ketika didengar. Kebijakan ini menarik simpati penduduk pribumi terhadap pemerintah kolonial dari segi social dan politik. Padahal kebijakan etis sebenarnya merupakan upaya yang digunakan oleh para sarjana Belanda untuk mengeksploitasi kekayaan Indonesia. Dengan demikian, kebijakan Politik Etis ini

tidak dapat dipisahkan dari kepentingan kolonial, yang notabene adalah intensifikasi dan eksploitasi koloni (Sumarno, Aji, & Hermawan, 2019: 370).

Sekolah-sekolah Anak Belanda dan Pribumi pada Masa Tanam Paksa dan Politik Liberal Belanda

Sekolah bagi anak Belanda pertama kali dibuka di Jakarta pada tahun 1817 yang kemudian diikuti oleh pembukaan sekolah di kota-kota lain di Jawa. Jumlah sekolahpun kemudian meningkat dari 7 (tahun 1820), 19 (tahun 1835), 25 (tahun 1845), dan 57 (tahun 1857). Hal ini sesuai dengan isi Statuta 1818 yang menyatakan bahwa sekolah-sekolah harus dibuka “di setiap tempat apabila diperlukan oleh penduduk Belanda dan diizinkan oleh keadaan” atau apabila jumlah murid mencapai 20 orang di Jawa atau 15 orang di luar Jawa. Pada tahun 1830 diangkat seorang inpektur pendidikan dan dikebanyakan kota telah terdapat sekolahan (Penders, 1968: 1-29).

Sekolah ini didirikan karena sebagian besar beban yang ditanggung masyarakat pribumi. Hal ini mengakibatkan masyarakat harus membayar sekitar 80% biaya dari total jumlah pajak yang dipungut selama masa *cultuurstelsel* ataupun *Agrarische Wet* pada akhir abad ke-19 tahun 1870 yang tercatat di dalam John Sydenham Furnivall (1944: 343). Selain itu, ketimpangan regional yang khas juga terlihat. Tingkat melek huruf di daerah luar Jawa lebih tinggi daripada di daerah pusatnya yaitu Jawa dan Batavia. Pada tahun 1930, penduduk pribumi baik laki-laki maupun perempuan di kepulauan luar Indonesia berada pada 13,4% dan 4,0% masing-masing terhadap 9,7% dan 1,4% penduduk di Jawa. Namun, untuk tingkat minoritas Cina itu sebaliknya yaitu, 33,2% dan 7,7% di kepulauan luar dan 47,5% dan 16% berada di Jawa (Frankema, 2014: 4-5; Furnivall, 1943: 76).

Peserta didik *Europese Lagere School* (ELS) menerapkan kebijakan pada sistem pendidikannya bahwa semua anak Eropa dan mereka yang legal disamakan dengan orang Eropa yaitu berhak untuk memasuki dan menjadi peserta didik *Europese Lagere School* (ELS). Kemudian *Hogere Burger School* (HBS) ditujukan bagi murid-murid Belanda dan golongan atas yang tidak mampu secara finansial untuk menyekolahkan anaknya ke ELS kelas satu. Pada ELS juga diajarkan bahasa Perancis sebagai syarat masuk di HBS selain ujian masuk (Nasution, 2008: 134). Awalnya HBS tidak menerima peserta didik wanita karena banyak yang menentang hal tersebut. Selain itu,

ada anggapan bahwa penerimaan peserta didik wanita dapat menimbulkan persoalan yang bisa menuai pro dan kontra. Namun, pada tahun 1891 terdapat perubahan. Pada tahun ini gadis-gadis untuk bersekolah di HBS (Nasution, 2008: 134). *Europese Lagere School* (ELS) pertama kali didirikan tahun 1817 di wilayah Batavia (Jakarta). Sekolah yang seruo dengan ELS diperbolehkan berdiri disetiap tempat asal jumlah murid mencapai 20 orang di Jawa dan 15 orang di luar Jawa. Pada tahun 1920 jumlah murid di ELS meningkat hingga menjadi 196 buah (Penders, 1968: 26-27).

HBS pertama kali didirikan di Jakarta pada tahun 1867, di Surabaya tahun 1875, dan di Semarang pada tahun 1877. Awalnya HBS di wilayah Surabaya dan Semarang diselesaikan selama 3 tahun, tetapi pada tahun 1879 berubah menjadi 5 tahun. Pada tahun 1882 didirikan HBS dengan lama waktu belajar 3 tahun untuk anak wanita di Batavia. Kurikulum HBS yang diterapkan di Indonesia tidak berbeda dengan yang diterapkan di negeri Belanda. Kurikulum ini dianggap baik dan tidak mengalami banyak perubahan selama eksistensinya mengajarkan pengetahuan Barat dan pembelajaran *teacher centris* dan dapat bertahan terhadap berbagai macam kritik dari berbagai pihak. Pada tahun 1903 kursus *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) didirikan serta disambut baik oleh orang Indo-Eropa. Mereka yang tidak sanggup menyekolahkan anaknya ke HBS karena mahal dapat memasukkan anaknya ke MULO yang dianggap dapat memungkinkan lulusannya bekerja di kantor pemerintahan (Sukardjo & Komarudin, 2009: 127).

Pada tahun 1870, sistem tanam paksa resmi dihapuskan dan digantikan dengan Undang-Undang Agraria 1870. Undang-undang ini memungkinkan pihak swasta menyewa tanah selama 75 tahun kepada pemerintah Indonesia. (Kartodirdjo, 2014b). Pada tahun 1852 juga dibuka sekolah Pendidikan Guru pertama kali dan dibarengi dengan didirikannya Departemen Pendidikan, Agama, dan Industri yang mengurus kegiatan pendidikan nasional kolonial di Indonesia (Zainu'ddin, 1970: 23; Suratminto, 2013: 78). Setelah tahun 1870, ekonomi mulai memburuk dan membuat Belanda memotong gaji guru. Hal ini menyebabkan kecenderungan untuk menyerahkan pendidikan ke swasta guna meringankan beban finansial. Memberikan subsidi kepada sekolah dianggap lebih murah dibandingkan dengan memelihara sekolah pemerintah. Pada tahun 1885 terjadi krisis gula yang menimbulkan kerugian sehingga pengeluaran dibatasi, biaya pendidikan dikurangi, sejumlah sekolah guru harus ditutup, dan

perluasan sekolah rendah segera dihentikan. Kemudian Groenevelt menyarankan 2 jenis sekolah, yaitu 1). Sekolah Kelas Satu yang diperuntukkan bagi anak golongan atas yang akan menjadi pegawai, 2). Sekolah Kelas Dua yang diperuntukkan bagi penduduk pribumi dari golongan menengah dan bawah serta kurikulum sekolah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan keputusan raja pada 28 September 1892 yang termuat dalam Lembaran Negara (*Staatblad*) nomor 125 tahun 1893, terjadi reorganisasi pada kebijakan pendidikan dasar dimana sekolah dasar bumiputera/pribumi dibedakan sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Kelas Satu (*De Eerste School*). Sekolah ini dimasuki oleh anak dari tokoh terkemuka dan orang-orang terhormat bumiputera.
2. Sekolah Dasar Kelas Dua (*De Tweede Klasse School*) yaitu sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak bumiputera/pribumi pada umumnya. Sekolah ini mengarahkan muridnya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat biasa (Gunawan, 1985: 13; Jusuf, 2012: 20).
3. Sekolah Desa merupakan bentuk perwujudan keinginan pemerintah untuk menyebarkan pendidikan seluas mungkin dan dengan biaya serendah mungkin di kalangan penduduk. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sekolah desa berfungsi sebagai alternatif murah dan dasar agar penduduk pribumi tetap bisa mengenyam pendidikan Barat. Selanjutnya, terdapat *Vervolgschool* sebagai lanjutan dari pendidikan menengah dari Sekolah Desa. *Vervolgschool* ini merupakan bagian dari Sekolah Desa dengan tingkat pendidikan menengah untuk masyarakat yang ada di pedesaan (Suratminto, 2013: 80).
4. *Hollands Inlandsche School* (HIS), di wilayah Surabaya terdapat HIS Negeri dan HIS bersubsidi. HIS negeri ini didirikan tahun 1914 dengan lama waktu belajar 7 tahun serta menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Bagi orang pribumi HIS adalah jalan utama untuk meningkatkan derajat sosial karena sekolah ini pada awalnya diperuntukkan bagi orang-orang elite saja. Namun, setelah adanya Politik Etis, HIS juga bisa dimasuki oleh anak-anak yang berasal dari golongan rendah (Nasution, 1983: 115).
5. *Algemene Middelbare School* (AMS) didirikan sebagai sekolah lanjutan MULO sekaligus sebagai persiapan untuk memasuki perguruan tinggi dengan masa belajar 3

- tahun. Saat ini AMS setara dengan SMA (S. Kutoyo dan Sri Soetjiatingsih, 1981: 130).
6. Sekolah Raja (*Hoofdenschool*) atau biasa disebut OSVIA (*Opleiding School voor Indische Ambtenaren* atau Sekolah untuk Pendidikan Pribumi). Kemudian sekolah ini ditingkatkan statusnya menjadi sekolah menengah yang disebut MOSVIA (*Middelbaar Opleiding School voor Indische Ambtenaren*). Sekolah ini berfungsi untuk mendidik para kandidat pejabat pemerintahan dengan lama waktu belajar 5 tahun (Suratminto, 2013: 79).
 7. Sekolah Pendidikan Guru (*Kweekschool*). Sekolah Pendidikan Guru di Indonesia pada awalnya diselenggarakan oleh zending di Ambon tahun 1834. Sekolah ini berjalan hingga 30 tahun (1864) serta dapat memenuhi kebutuhan guru pribumi untuk beberapa sekolah pada waktu itu. Sekolah seperti diselenggarakan oleh zending di Minahasa pada tahun 1852 dan pada tahun 1855 dibuka satu lagi di Tanahwangko (Minahasa). Bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah Ambon dan Minahasa adalah bahasa Melayu. Peraturan ini menekankan bahwa perhatian harus diberikan untuk melatih guru-guru Indonesia yang berkualitas. Kemudian antara 1873 dan 1879 terdapat enam sekolah pelatihan guru baru yang didirikan. Durasi kursus pelatihan guru ini adalah empat tahun (Penders, 1968: 23).

Kesimpulan

Pendidikan di Indonesia diawali karena adanya sistem tanam paksa dan politik liberal yang diterapkan di Indonesia. Kebijakan ini mendapat kritik dari beberapa tokoh dan golongan karena menimbulkan banyak penderitaan dan kemiskinan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah kolonial harus memerhatikan kepentingan masyarakat pribumi karena semua yang diperoleh oleh Belanda merupakan hasil kerja keras dari Bangsa Indonesia. Dengan demikian, Belanda harus membayar hutang tersebut dengan menyelenggarakan trias yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi. Kritik ini pun akhirnya di setujui oleh ratu Belanda dan pendidikan mulai diselenggarakan. Namun, pada saat itu pendidikan berjalan dengan diskriminasi karena terdapat sekolah yang membedakan kelas antara anak elite bangsawan atau tokoh yang pro Belanda dengan anak rakyat biasa atau golongan rendah. Hal ini terjadi karena anak bangsawan atau tokoh pro

belanda ini nantinya akan bekerja untuk membantu Belanda, sedangkan anak rakyat biasa hanya menjadi pekerja kasar atau rendahan. Pendidikan hanya dipusatkan untuk membantu semua kepentingan penjajah. Namun, dalam sejarah pendidikan dapat dikatakan bahwa intelegensi bangsa Indonesia tidak kalah dengan penjajah. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya tokoh-tokoh bangsa yang berpendidikan Barat. Tokoh-tokoh ini kemudian membentuk organisasi sosiopolitik dan budaya modern dengan strategi kooperatif maupun nonkooperatif. Hal inilah yang nanti akan mendorong munculnya beberapa tokoh kebangkitan nasional yang memiliki pemikiran luas dan mau membela rakyat Indonesia untuk merdeka. Dengan demikian, hal ini menjadi titik awal perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.

Daftar Rujukan

- A, Daliman. (2012). *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal abad XX*. Yogyakarta: Ombak.
- Aji, R., & Hermawan, E. (2019). Ethical Politics and Educated Elites In Indonesian National Movement. *In International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019)* (pp. 368-372). Atlantis Press..
- Aprilia, A. T., Irawan, H., & Budi, Y. (2021). Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa di Hindia Belanda 1830-1870. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 1(2), 119-134.
- Brugmans, I.J. (1938). *Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-Indië*. Groningen: J.B. Wolters.
- Djumhur dan Danasuparta. 1974. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Frankema, Ewout H.P. (2014). *Why was the Dutch legacy so poor? Educational Development in the Netherlands Indies, 1871-1942*. CGEH Working Paper Series No. 54. Utrecht, Netherlands: Centre for Global Economic History Universiteit Utrecht.
- Furnivall, John Sydenham. (1943). *Educational Progress in Southeast Asia*. New York: Institute of Pacific Relations.
- Gottschalk, Louis. (1985). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Gunawan, Ary H. (1985). *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Jusuf, Iskandar. (2012). *Dari Tiong Hoa Hwe Koan 1900 sampai Sekolah Terpadu Paha 2008*. Tangerang Selatan: Sekolah Terpadu Paha.
- Kartodirdjo, Sartono. (2014). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1900-1942: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jilid 2. Yogyakarta: Ombak.

- Kusmayadi, Y. (2018). Sejarah Perkembangan Pendidikan di Priangan 1900-1942. *Jurnal Artefak*, 4(2), 141-152.
- Nasution S. (2016). Strategi Pendidikan Belanda Pada Masa Kolonial di Indonesia. (Online)(<http://www.jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/view/431/333>). Diakses pada 11 November 2019 pukul 19.00 WIB.
- Nasution. (1987). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bandung: Jemmars.
- Penders, Christiaan Lambert Maria. (1968). *Colonial Education Policy and Practice in Indonesia: 1900-1942*. Thesis Ph.D. unpublished. Canberra: Department of Pacific History, The Australian National University.
- Rifa'i, Muhammad. (2011). *Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- S. Kutoyo dan Sri Soetjiatingsih. (1981). *Sejarah Nasional Indonesia (jilid V)*. Jakarta: Pt.Grafitas.
- Salim, Agus dkk. (2007). *Indonesia Belajarlah!: Membangun Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sjamsuddin, Helius. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sondarika, W. (2019). Dampak Culturstelsel (Tanam Paksa) Bagi Masyarakat Indonesia dari Tahun 1830-1870. *Jurnal Artefak*, 3(1), 59-66.
- Sukardjo & Ukim Komarudin. 2009. *Landasan Kependidikan Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suratminto, L. (2013). Educational Policy in the Colonial Era. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 14(1), 77-84.
- Suryadinata, L. (1972). Indonesian Chinese Education: Past and Present. *Indonesia*, (14), 49-71. doi:10.2307/3350732.
- Zainu'ddin, Ailsa. (1970). Education in the Netherlands East Indies and the Republic of Indonesia. *Melbourne Studies in Education*, 12 (1), 17-82.